

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM MEMBUKA LAHAN DAN FAKTOR PEMICU KEBAKARAN LAHAN PROVINSI RIAU

COMMUNITY PERCEPTION ON LAND CLEARING AND FACTORS OF FIRE LAND OF RIAU PROVINCE

Rindukasih Bangun¹, Rosnita², Herlon², Pebrian², Oktari², Ratna Megawati¹, Harniwita¹

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

²Fakultas Pertanian Universitas Riau

Email: rindubangun05@gmail.com

ABSTRACT

Land and forest fires in Riau Province mostly begins by human activity. The purpose of the study is 1) Describe the perception of the public in using and managing land by burning and without burning, 2) Knowing the supporting factors that cause fire, 3) Reviewing community and institutional efforts in prevention and control fire. Location of study conducted in four districts, Kepulauan Meranti District, Rokan Hulu District, Pelalawan District, and Kampar District. Implementation of the study using survey methods and Rapid Rural Appraisal (RRA). The result of this study are 1) The public perception of land clearing by burning due to a) The fee required in technical land clearing by burning relatively cheap when compared to the way of land clearing without burning, b) Technical land clearing does not need many labors, c) The ashes of burnt remains are useful to fertilize the soil, d) Activity land clearing by burning is a culture or tradition that occur for generations, 2). Causative factors of land and forest fires are: a) Aspects of biophysical, b) Climatic conditions, c) Physical conditions, d) Economic conditions (the level of forest and land dependence is very high), e) Social and cultural conditions (community social capital is still quite lacking in terms of awareness of the impact and dangers of fire use), 3). Efforts to prevent and control forest and land fire has been done by the community and government institutions.

Keywords : Fires, Land, Perception, Organization.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau dominan disebabkan oleh aktivitas kegiatan manusia. Tujuan kajian adalah: 1) Menggambarkan persepsi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola lahan dengan cara membakar dan tanpa membakar, 2) Mengetahui faktor yang mendukung terjadinya kebakaran, 3) Mengkaji upaya masyarakat dan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran. Lokasi kajian dilakukan pada empat Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kabupaten Kampar. Pelaksanaan kajian menggunakan metode survei dan *Rapid Rural Appraisal (RRA)*. Hasil kajian adalah 1) Persepsi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar disebabkan:

a) Biaya yang diperlukan dalam membuka lahan dengan cara membakar relatif murah jika dibandingkan dengan cara tanpa membakar, b) Teknis membuka lahan dengan membakar tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, c) Abu sisa bakaran lahan berguna untuk menyuburkan tanah, d) Kegiatan membuka lahan dengan cara membakar merupakan budaya atau tradisi yang terjadi secara turun-temurun. 2) Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah: a) Aspek biofisik, b) Kondisi iklim, c) Kondisi fisik, d) Kondisi ekonomi (tingkat ketergantungan kepada hutan dan lahan yang sangat tinggi), e) Kondisi sosial dan budaya (modal sosial masyarakat masih cukup kurang dalam hal kesadaran dampak dan bahaya penggunaan api). 3) Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh masyarakat dan kelembagaan pemerintah.

Kata kunci: Kebakaran, Lahan, Persepsi, Kelembagaan

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki andil dalam bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat dilihat dari meningkatnya luas areal terbakar dari tahun ke tahun, dimana tahun 2014 seluas 6.301,10 Ha, tahun 2015 seluas 4.040,5 Ha dan tahun 2016 seluas 1.928,3 Ha (Karhutla Monitoring System, 2017). Empat puluh persen dari daerah terbakar di Provinsi Riau merupakan dataran rendah yang bergambut dan sebagian diantaranya dipengaruhi oleh pasang surut. Titik sebaran kebakaran mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau (Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti). Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan di dalam negeri tapi juga oleh negara tetangga ASEAN, sedangkan dampak yang dirasakan langsung oleh Provinsi Riau akibat

kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap antara lain: 1) Penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang meningkat 2) kerugian perusahaan penerbangan, 3) Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa dimata negara tetangga dan dunia (Hermawan, 2006).

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan perusahaan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran diantaranya: 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebakaran dan dampak yang ditimbulkannya serta sanksi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung, 2) Mendorong masyarakat untuk melakukan pengolahan lahan tanpa membakar, 3) Melibatkan masyarakat secara bergotong-royong dalam menangani kebakaran yang terjadi, 4) Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), 5) Sanksi hukum bagi masyarakat yang telah melakukan pembakaran lahan dengan sengaja dalam aktivitasnya.

Dengan adanya upaya yang telah

dilakukan diatas, seperti apa persepsi masyarakat terhadap pembukaan lahan dengan cara tanpa membakar, dan faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan di Provinsi Riau? Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan kajian terhadap persepsi masyarakat saat ini terhadap pembukaan lahan tanpa membakar dan faktor apa saja yang masih menjadi pemicu terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Aritkel ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dengan judul 'Kajian Pengembangan Model Insentif bagi Masyarakat Membuka Lahan Tanpa Bakar di Provinsi Riau' (Balitbang Riau, 2017). Penelitian dilakukan pada 4 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kampar, dengan waktu pelaksanaan dimulai dari Bulan Juni sampai Bulan Desember 2017.

Pelaksanaan kajian menggunakan metode survei, dengan metode *Rapid Rural Apraisal* (RRA) terhadap responden. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Dalam kajian kualitatif menggunakan 3 macam pengecekan keabsahan data : 1) Kepercayaan, 2) Kebergantungan, dan 3) Kepastian.

Sampel penelitian yang menjadi responden untuk diwawancarai terdiri: 1) masyarakat petani dan kelembagaan petani yang memanfaatkan lahan dalam kegiatan usahatani dengan pengambilan sampel menggunakan metoda *snowball Sampling*, 2) Sampel dari pihak yang mewakili perusahaan dan Pemerintah yaitu dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan aparat desa yang diambil secara *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi masyarakat dalam membuka lahan

Persepsi masyarakat melakukan pembukan lahan dengan cara membakar adalah karena 1) biaya yang digunakan sangat murah, 2) hasil dari sisa pembakaran dapat menyuburkan tanah, 3) tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak saat membakar, dan 4) cara ini sudah merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Selama ini masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar hanya bermodalkan korek api dan minyak tanah atau ban bekas saja. Membuka lahan dengan cara membakar lebih mudah dan murah (Rp.3.500.000–Rp.5.000.000 per hektare (CIFOR dan Walhi, 2006)), selain itu masyarakat yang membuka lahan, tebang, imas dan bakar merupakan langkah yang paling mudah dibandingkan dengan cara mekanis yang memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Teknologi pembukaan lahan dengan

cara membakar dilakukan masyarakat setempat dalam skala kecil dan besar dengan cara cincang, tumpuk dan bakar.

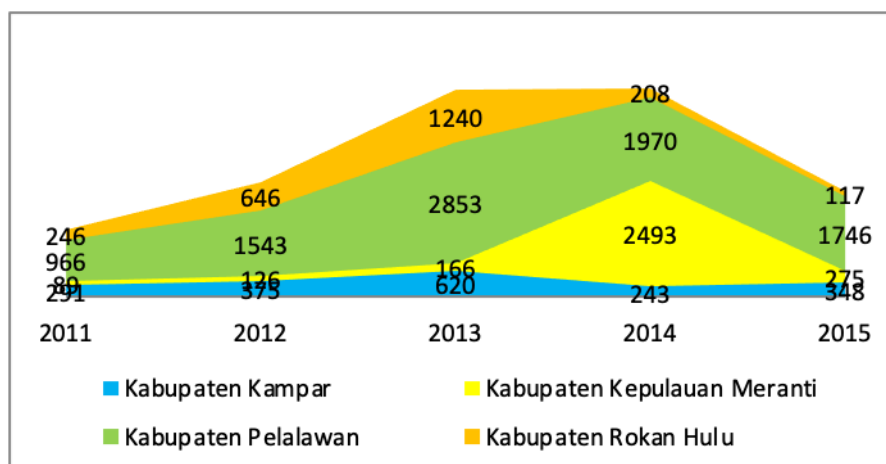
2. Faktor-faktor penyebab atau pendukung kebakaran hutan dan lahan

Penyebab utama terjadinya kebakaran hutan adalah karena aktivitas manusia dan hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kejadian alam, hal ini sejalan dengan pengamatan dan hasil wawancara yang menyatakan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan merupakan akibat dari aktifitas manusia. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: a) Aspek Biofisik, b) Kondisi Fisik, c) Kondisi Ekonomi, dan d) Sosial dan Budaya, serta e) Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum.

a. Aspek Biofisik

Faktor Cuaca dan Iklim

Kondisi iklim terutama pada periode dimana curah hujannya rendah merupakan salah satu pendorong terjadinya kebakaran. Penyimpangan iklim yang menyebabkan rendahnya curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Beberapa kali kebakaran hutan dan lahan besar (tahun 1997, 2002, 2013, 2014-2015) terjadi pada tahun-tahun kering yang berkepanjangan, terutama bersamaan dengan munculnya fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan tingkat kerawanan kebakaran semakin tinggi akan terjadi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Puncak titik panas di daerah penelitian terjadi pada tahun 2013-2014. Tingginya titik panas berdampak kepada tingginya jumlah kebakaran di daerah penelitian. Titik panas dalam 3 tahun terakhir pada lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Matrik Titik Panas pada daerah Penelitian dan Propinsi Riau, 2016
Sumber: SiPongiKMS (Karhutla Monitoring System), 2017

Angin

Secara umum tingkat kebakaran dapat dipercepat dengan adanya tingkat kecepatan angin (angin laut maupun angin darat). Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pelalawan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut/selat. Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, tiupan angin laut dapat mempercepat penjaralan api. Sedangkan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu tingkat percepatan kebakaran dapat dipengaruhi oleh tingkat percepatan angin darat. Angin merupakan faktor pemicu dalam penyebaran api yang dapat mempercepat perluasan kebakaran. Angin mempercepat pengeringan bahan bakar dan memperbesar ketersediaan oksigen sehingga api berkobar dan meluas dengan cepat. Disamping itu, angin dapat menerbangkan bara api yang dapat menimbulkan api loncat dan terjadi kebakaran baru.

Faktor Lahan Gambut (Tipe Tanah)

Provinsi Riau adalah daerah yang sebagian besar merupakan lahan gambut. Lahan gambut merupakan ekosistem yang marjinal dan rapuh sehingga mudah rusak. Berusahatani di lahan gambut harus dilakukan secara hati-hati karena menghadapi banyak kendala antara lain kematangan dan ketebalan gambut yang ada, penurunan permukaan gambut, rendahnya kesuburan tanah, adanya lapisan pirit dan pasir, pH tanah yang sangat masam, kondisi lahan gambut yang jenuh air (tergenang) pada musim hujan dan

kekeringan saat kemarau, serta rawan kebakaran. Beberapa penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut disebabkan oleh: 1). Sengaja dibakar untuk membuka lahan (efektif dan hemat waktu) atau mengolah tanah guna memperoleh kesuburan tanah, 2) Kecerobohan manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan terutama di musim kemarau, 3) Membuat drainase tanpa membuat pintu air yang berguna untuk mengatur tinggi air di permukaan gambut.

Faktor Lahan Gambut Bekas Terbakar

Kerusakan yang disebabkan oleh konversi lahan bersifat permanen akibat adanya penurunan permukaan lapisan gambut (*subsidence*). Penurunan terjadi akibat pembangunan kanal-kanal disekitar areal perkebunan kelapa sawit yang bertujuan mengalirkan air. Kekeringan permukaan gambut akan memicu terjadinya kebakaran lahan pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun juga berdampak buruk pada lahan pertanian masyarakat. Kebakaran besar yang tidak bisa dikendalikan meluas ke perkebunan dan lahan usahatani masyarakat, hal ini menyebabkan kerugian besar pada pemilik kebun. Petani yang lahannya terbakar banyak yang tidak bisa menanam dan berusahatani kembali dikarenakan kurangnya modal ekonomi. Petani tersebut hanya merawat lahannya dan menunggu sampai memiliki modal yang cukup

untuk berusahatani kembali. Akibat kurangnya modal maka lahan tersebut akan menjadi lahan tidur yang berpotensi terjadinya kebakaran.

b. Kondisi Fisik

Kondisi fisik hutan dan lahan yang telah terdegradasi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran. Terdegradasinya hutan dan lahan gambut dapat disebabkan oleh aktivitas *illegal logging*, konversi hutan dan lahan untuk perkebunan. Selain itu, keberadaan parit / kanal / saluran air yang dibuat oleh masyarakat untuk mengeluarkan kayu dari hutan juga memperparah tingkat kerusakan lahan gambut. *Illegal logging* telah menyebabkan hutan terbuka dan terakumulasinya limbah hasil *logging* yang menjadi sumber bahan bakar. Konversi hutan dan lahan gambut menjadi pemukiman, persawahan dan perkebunan mendorong dilakukannya *land clearing* menggunakan cara membakar. Pembuatan kanal-kanal dan parit telah menyebabkan lahan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau sehingga menyebabkan gambut menjadi rusak. Terjadinya gejala kering tak balik (*irreversible drying*) dan gambut berubah sifat seperti arang sehingga tidak mampu lagi untuk menyerap hara dan menahan air.

c. Kondisi Ekonomi

Budaya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam telah mendorong terjadinya

eksploitasi yang tidak terkendali dan kurang bertanggung jawab. Masyarakat setempat kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta (*illegal logging*) berakibat terhadap tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan. Beberapa faktor ekonomi yang menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar adalah sebagai berikut:

Pendapatan Keluarga

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga itu sendiri. Sehubungan dengan tingkat pendapatan atau penghasilan berikut, kriteria golongan pendapatan menurut Koentjaraningrat, yaitu: a) Golongan berpenghasilan rendah, b) Golongan berpenghasilan sedang, dan c) Golongan berpenghasilan tinggi. Berdasarkan pengelompokan pendapatan masyarakat tersebut, dapat dikatakan masyarakat yang membakar lahan kebanyakan tergolong kedalam masyarakat berpenghasilan sedang. Pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sehingga dalam melakukan proses pembukaan lahan para petani lebih memilih dengan cara membakar.

Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan menjadi salah satu penyebab kebakaran lahan, umumnya lahan yang dimiliki masyarakat adalah lahan hak milik sendiri. Responden mengatakan bahwa hak milik lahan yang dikuasai adalah milik sendiri sehingga responden berani melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Aktivitas masyarakat dalam membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar merupakan hal yang biasa saja dan sudah dilakukan dari dahulu baik itu membakar ranting disekitar lahan maupun ilalang. Yang menjadi permasalahan adalah kegiatan tersebut kurang diawasi oleh masyarakat sehingga mengakibatkan kebakaran yang tidak terkendali. Kepemilikan lahan oleh orang dari luar daerah juga menyebabkan banyaknya lahan tidur atau lahan yang tidak terurus. Lahan tidur yang bersemak dan kering sering membuat api yang besar dan meluas ke lahan sekelilingnya.

Luas lahan

Luas lahan yang dimiliki masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran lahan, dikarenakan luas lahan menentukan pengambilan keputusan dalam membuka lahan dengan cara membakar atau tanpa bakar. Berdasarkan wawancara di lapangan, semakin luas lahan yang dimiliki dan dibuka untuk usahatani akan semakin besar kemungkinan masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan

cara membakar dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan nilai ekonomi dalam pembukaan lahan dengan cara membakar tergolong murah dan dari segi waktu lebih singkat. Perbandingan antara membuka lahan dengan cara membakar membutuhkan biaya Rp. 400.000-600.000 / Ha sedangkan membuka lahan tanpa bakar adalah Rp.3.000.000 – 6.000.000 / Ha. Pembukaan lahan dengan membakar hanya membutuhkan tenaga kerja 28 HOK (Hari Orang Kerja), sementara pembukaan lahan secara mekanis untuk hutan primer membutuhkan 80 HOK ditambah 12 jam kerja traktor. Untuk hutan sekunder diperlukan 53 HOK ditambah 10 jam traktor. Berdasarkan Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang dikeluarkan Direktorat Perlindungan Perkebunan, diperlukan waktu 48 hari kerja untuk membersihkan semak berlukar dengan tenaga manusia. Setiap hektarenya mengeluarkan biaya Rp.2.400.000, ditambah dengan traktor selama enam hari memakan biaya Rp.1.200.000 per hektare. Total pembukaan lahan tanpa bakar memakan biaya Rp.3.600.000 per hektare. Sehingga di simpulkan metode pembukaan lahan dengan cara tebang habis dan pembakaran merupakan alternatif pembukaan lahan yang paling murah, mudah dan cepat.

Kesuburan tanah

Dalam budidaya pertanian tingkat kesuburan tanah akan sangat berpengaruh terhadap tingkat

kesuburan tanaman. Khusus untuk budidaya pada lahan gambut akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk proses penyuburan tanah, hal ini berbanding terbalik dengan kemampuan petani yang masih rendah dalam membeli pupuk. Maka salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk menyuburkan tanah adalah dengan melakukan pembakaran. Masyarakat berpendapat bahwa dengan cara membakar lahan dapat menyuburkan lahan, karena sisa pembakaran yang berupa abu dapat berfungsi untuk menetralkan Ph tanah.

Mata pencarian/pendapatan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seorang kepala rumah tangga akan berupaya untuk memperoleh pendapatan dari pekerjaan yang dilakukannya. Bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan yang rendah, pekerjaan yang sering dilakukan adalah pekerjaan yang taat pada peraturan ataupun yang berlawanan dengan peraturan yang berlaku. Salah satu pekerjaan yang dilakukan masyarakat yang berlawanan dengan peraturan adalah bekerja membuka lahan dengan teknik membakar. Teknik pekerjaan ini dilakukan dengan cara tebas bakar. Proses yang dilakukan adalah dengan cara melakukan penebasan dan dibiarkan kering, kemudian dilakukan pembakaran yang kemudian pelaku akan meninggalkan areal pembakaran.

Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan

Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti kopi dan coklat. Perbedaan biaya produksi yang tinggi menjadi satu faktor pendorong penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Metode penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan.

Kebutuhan akan hijauan makanan ternak (HMT)

Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak lepas dari ternak dan penggembalaan. Ternak (terutama sapi) menjadilah satu bentuk usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan akan HMT dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang rumput terbakar akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi.

d. Sosial dan Budaya

Konflik

Menurut Narwoko dan Suyanto (2005), konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan

melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam pengertian lain, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik terjadi melalui suatu proses (Wirawan, 2010). Beberapa konflik yang ditemui di lapangan adalah: 1) Konflik antara perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan, 2) Terjadinya perebutan lahan milik masyarakat tempatan oleh perusahaan 3) Terjadinya penyerobotan lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada areal konsesi perusahaan (HPH) 4). Terjadinya penyerobotan lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada areal hutan lindung akibat ketidaktahuan masyarakat batas hutan lindung dan dalam pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar.

Berbagai konflik sosial sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Adanya rasa tidak puas sebagian masyarakat atas pengelolaan hutan bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada. Terbatasnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan

masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan sangat berpengaruh terhadap tindakan mereka dalam mengelola hutan yang cenderung destruktif.

Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab kebakaran dikarenakan kurangnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan penduduk khususnya tentang ilmu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pandangan jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan, salah satunya dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Sistem pengetahuan lokal atau pengetahuan penduduk asli tentang lahan, menempatkan tahapan pembakaran sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan tradisional yang mempunyai tradisi unik, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, diberikan melalui uji coba (*trial and error*) dalam waktu lama. Tahap pembakaran merupakan tindakan sadar dari petani yang mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Sebagai tindakan sadar, tentu petani ladang mempunyai cara dalam membakar. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap karakteristik dan sifat api yang spesifik juga memberikan andil besar terhadap kebakaran lahan.

Tradisi

Tradisi turun menurun masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar merupakan salah satu faktor utama terjadinya kebakaran. Sebagian masyarakat

kurang peduli bahwa tradisi mereka dalam membuka lahan dapat menyebabkan kebakaran lahan yang bisa meluas. Masyarakat beralasan membuka lahan dengan cara membakar sebagai pertimbangan dalam penghematan biaya.

Kegiatan membuka lahan dengan cara membakar sudah ada sejak zaman dahulu dan bukan hal yang mudah untuk menghilangkan budaya membakar tersebut, sebab dengan cara pembakaran dianggap paling efektif dan mudah untuk dilakukan. Namun yang jadi permasalahannya sekarang sering lainnya penduduk dalam membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar kurang dikontrol sehingga mengakibatkan kebakaran lahan yang tidak terkendali dan sering mengakibatkan kerugian para petani itu sendiri yang lahan usahatannya terbakar secara tidak sengaja.

Kurangnya Kesadaran

Sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebab adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan penduduk mengambil rotan yang biasanya sambil bekerja mereka menyalakan rokok. Tanpa disadari, mereka membuang puntung rokok dalam

kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadi kebakaran.

e. Kebijakan Pemerintah dan Penegakan Hukum

Perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri)

Kerusakan hutan (*deforestasi*) masih tetap menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan laju deforestasi periode 2000-2015 di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar pertahun. Penyebab kebakaran yang terjadi di Riau dalam dua dekade terakhir tidak lepas dari dugaan berdirinya perusahaan HTI, dalam pembukaan lahan maupun perluasan lahan perusahaan diduga membuka lahan dengan cara membakar.

Respon pemerintah

Pemerintah Provinsi Riau kurang serius dalam penanganan bencana daerah, terbukti dari anggaran yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sebesar 6,6 milyar di tahun 2015. Dengan dana yang hanya sedikit tidak bisa berbuat banyak dalam menghentikan bencana asap yang terus melanda tanah melayu. Kurang pedulinya Pemprov Riau terlihat dari membiarkan pembukaan lahan untuk perusahaan perkebunan.

Kebakaran hutan yang berlangsung lama dan kurangnya intensitas curah hujan di Provinsi Riau mengharuskan pemerintah untuk membuat hujan buatan guna

menghentikan kebakaran hutan maupun membersihkan kualitas udara dari asap. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hujan Buatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) biaya operasional untuk membuat hujan buatan sebesar Rp.115.000.000 perhari selama 10 jam dalam suatu wilayah. Tidak hanya melalui udara, tapi juga dari jalur darat dibutuhkan Pemadam Kebakaran yang sangat banyak untuk penanggulangan kebakaran. Anggaran penanggulangan bencana tidak bisa ditetapkan secara pasti, karena tidak ada yang tahu bencana apa saja dan sebesar apa yang akan terjadi sehingga dibutuhkan anggaran dana yang besar untuk biaya yang tidak terduga yang bisa digunakan suatu waktu.

Penegakan hukum

Kelemahan dalam penegakan hukum perkara kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya terkait hukum acara dan prosedur dalam memproses perkara perdata maupun pidana. Beberapa kebijakan atau hukum yang belum maksimal dalam penerapannya terutama dalam hal tindakan hukum bagi para penyebab kebakaran hutan dan lahan, diantaranya: 1) Peraturan Permerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, Nomor 45 Tahun 2004, dan UU No. 41 tahun 1999 dalam pasal 78 ayat 3, 4 dan 11). 2) Peraturan Presiden (Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2011), 3) Kebijakan Lingkungan Hidup (Undang-undang No 32 Tahun 2009 dan Permen LH

No 10 Tahun 2010), 4) Kebijakan Perkebunan (Undang-undang No. 18 Tahun 2004), 5) Kebijakan Lahan Gambut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, Undang-undang No. 21 tahun 1992, dan Keppres No. 32 tahun 1990).

Pembalakan liar atau illegal logging

Kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging* lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Seringkali, api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis tersebut. Kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging* seringkali meninggalkan bahan bakar (daun, cabang, dan ranting) yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran hutan.

Perambahan hutan

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan). Disadari atau tidak bahwa semakin lama, kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleknya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

3. Upaya Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Kebakaran pada dasarnya adalah peristiwa menjalarnya api liar (*wild fire*) yang berawal dari api kecil dan berasal dari para pengguna api dalam kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian. Karakteristik kebakaran dari aspek sosial unsur-unsurnya meliputi sumber pemicu yaitu manusia pengguna api, pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang proses dan kerugian akibat kebakaran dan penerapan teknik-teknik pencegahan kebakaran. Tiga kelompok penyulut api awal di hutan dan lahan rawa gambut adalah:

1. Pembakaran vegetasi baik masyarakat tingkat bawah maupun tingkat pelaku usaha
2. Aktivitas pembakaran dalam pemanfaatan sumber daya alam
3. Pembakaran lahan tidur dan penguasaan lahan

Pengelolaan kebakaran dapat dilakukan dengan membangun hutan yang dapat mengurangi resiko terhadap penyebab kebakaran. Model pengurangan resiko tersebut adalah pengembangan sistem *agroforestry*, pembukaan lahan, pengaturan jarak tanam, pembersihan cabang dan ranting bawah, manajemen gulma, penanaman rumput pendek untuk pakan ternak, pembuatan sekat bakar, pembuatan sumur air, pengadaan alat pemadam sederhana, serta pembuatan menara pengamat asap. Selain itu, alternatif pengelolaan kebakaran juga

dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar hutan dan lahan yaitu dengan membentuk kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada setiap desa dan melakukan pengawasan terhadap kelompok tersebut. Penanggulangan kebakaran dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan kebakaran, dimulai dari penggunaan api di lahan yang merupakan lokasi kebakaran. Mengembangkan sistem *agroforestry*, persiapan lahan yang diarahkan menuju Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), gambut yang dimanfaatkan untuk pembuatan bokasi, pencegahan yang berkesinambungan.
2. Deteksi dini, indikator titik panas (*hotspot*) berkorelasi dengan luas lahan terbakar. Ada model peramalan kejadian kebakaran 2 bulan kedepan berdasarkan hubungan curah hujan dengan *hotspot*.
3. Pemadaman, Kebutuhan air untuk pemadaman hutan rawa gambut (HRG) adalah 800 liter/m² pada kedalaman 1m. Strategi pemadaman api HRG dimulai dengan organisasi pemadaman yang terdiri dari komandan api dan regu pemadam. Teknik pemadaman juga bisa dilakukan melalui hujan buatan yaitu pemadaman dengan pesawat terbang (*water bombing*) (Akbar, 2013).

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu langkah dalam usaha pencegahan dan pengendalian

kebakaran lahan. Kelembagaan yang berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah kelompok tani, Masyarakat Peduli Api (MPA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut (BRG).

Dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, maka pemberdayaan masyarakat melalui penataan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat perlu dilakukan. Pendidikan dan pelatihan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu lembaga yang dapat dibentuk di tingkat desa atau kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat dalam menata lembaga dan mengelola lahan. Dengan demikian pemahaman dan keterampilan masyarakat dapat ditingkatkan termasuk kelembagaan yang ada. Kedepan masyarakat pengetahuan yang tinggi dan terampil akan membuat masyarakat mampu memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki dengan sistem pengelolaan yang mampu meminimalisir dampak lingkungan dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan lahan tanpa membakar.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar disebabkan: a) Biaya yang diperlukan dalam teknis membuka lahan dengan cara membakar relatif murah jika dibandingkan dengan cara membuka lahan tanpa membakar, b) Teknis membuka lahan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, c) Abu sisa bakaran lahan berguna untuk menyuburkan tanah, d) Kegiatan membuka lahan dengan cara membakar merupakan budaya atau tradisi yang sudah terjadi secara turun-temurun.

Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut dipengaruhi oleh: a) Aspek biofisik, b) Kondisi fisik, c) Kondisi ekonomi (tingkat ketergantungan kepada hutan dan lahan yang sangat tinggi), d) Kondisi sosial dan budaya (modal sosial masyarakat masih cukup kurang dalam hal kesadaran dampak dan bahaya penggunaan api), e) Kebijakan pemerintah dan penegakan hukum

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat, kelembagaan, maupun instansi-instansi pemerintah seperti kelompok tani, Masyarakat Peduli Api (MPA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut (BRG) yaitu melakukan pencegahan kebakaran dengan menerapkan pengelolaan lahan tanpa bakar, melakukan deteksi

dini titik panas, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Acep; Faidil, Sukhyar; Adriani, Susi; Syaifuddin. 2013. Kebakaran Hutan dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung dan Alternatif Pengelolaannya. Badan Litbang Kehutanan. Balai Penelitian Kehutanan. Banjarbaru
- Balitbang [Badan Penelitian dan Pengembangan] Provinsi Riau. 2017. Kajian Pengembangan Model Insentif bagi Masyarakat Membuka Lahan Tanpa Bakar di Provinsi Riau. Balitbang; Laporan Penelitian. Pekanbaru
- Hermawan, W. 2006. Dampak Kebakaran Kebun dan Lahan terhadap Lingkungan Hidup. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bagong. 2005. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- SiPongiKMS (Karhutla Monitoring System). 2017. Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Pekanbaru
- Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian. Salemba Humanika. Jakarta